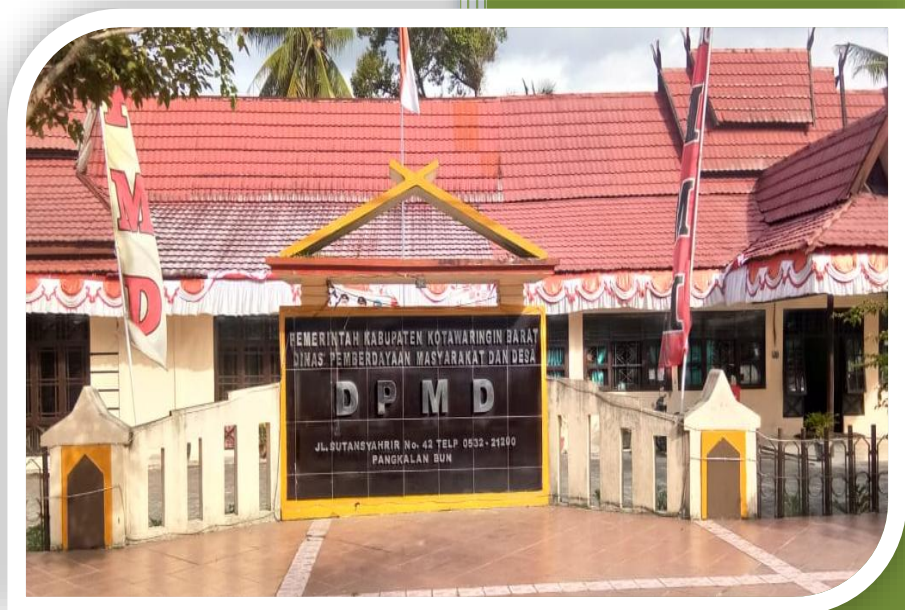




Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2020

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun Anggaran 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat 2020 ini.

Renja Perubahan – SKPD (Rencana Kerja Perubahan – Satuan Kerja Perangkat Daerah) ini disusun sebagai gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam tahun berjalan dengan memberikan skala prioritas pada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas daerah dalam pembangunan, sehingga rencana kerja SKPD ini, dapat selaras dengan program pemerintah pusat dan daerah, serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada di lapangan.

Dampak Covid 19 yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menuntut perencanaan kegiatan yang lebih urgen dengan mempertimbangkan arahan dari Kepala Daerah serta upaya pencapaian target kinerja yang diharapkan tetap stabil. Oleh karenanya diperlukan berbagai langkah strategis agar penyesuaian anggaran tidak berdampak signifikan terhadap deviasi pencapaian target kinerja.

Semoga, apa yang menjadi Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat ini, dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, Agustus 2020

**KEPALA DPMD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Dra. HARDANIYANTI
NIP 19620515 198903 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD.....	11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan & Kegiatan Masyarakat.....	28
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	29
3.3. Program dan Kegiatan.....	31
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Bagan Struktur Organisasi DPMD Kab. Ktw, Barat;	
2. Matrik RKPD Perubahan 2020.	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan menempati peranan yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan di tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/ kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di tingkat pusat maupun provinsi.

Dalam pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan *stakeholders* atau para pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD,

dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai *stakeholders* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan rencana strategis, sesuai dengan tugas pokoknya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu pada RKPD.. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu: “GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”, sedangkan Sasaran RPJMD yang juga menjadi Tujuan/Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat ada dua, yaitu ; (1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa, dan ; (2) Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa .

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga sifat dari rencana kerja dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 dengan mengarah pada pencapaian

sasaran pembangunan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.

I.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3 Undang-Undang Desa 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah.
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 15 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 16 Permendagri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan
- 17 Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 18 Permendagri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa
- 19 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- 20 Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
- 21 Permendagri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
- 22 Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa
- 23 Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
- 24 Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- 25 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa
- 26 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- 27 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 28 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- 29 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 30 Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

- 31 Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Taertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- 32 Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- 33 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Dinas Usaha Milik Desa
- 34 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 36 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 tahun 2009 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 37 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 adalah:

1. Sebagai acuan DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengoperasionalkan RKPd Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2020.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

.BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**, berisikan uraian mengenai :Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD,Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds),Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 ini adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis DPMD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.

Analisa dan Evaluasi Keuangan Pelaksanaan Renja 2019

Dalam rangka pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kotawaringin Barat di tahun 2019 mengalokasikan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **4.730.433.000,-** dan Belanja Langsung sebesar Rp. **3.686.770.000,-**. Data anggaran dan realisasi DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2019 adalah tersaji sebagai berikut:

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
I.	BELANJA DAERAH	8.417.203.000	8.203.118.438	97,46
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.730.433.000	4.651.779.772	98,34
	- Belanja Pegawai	4.730.433.000	4.651.779.772	98,34
II.	BELANJA LANGSUNG	3.686.770.000	3.551.338.666	96,33
	- Belanja Pegawai	289.366.000	283.047.986	97,82
	- Belanja Barang dan Jasa	3.309.935.450	3.181.092.730	96,11

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

- Belanja Modal	87.468.550	87.197.950	99,69
JUMLAH BTL dan BL	8.417.203.000	8.203.118.438	97,46
Capaian Kinerja Keuangan			97,46

Rincian Capaian Belanja Langsung sebagai berikut ini:

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	509.150.727,00	492.970.173,00	96,82
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	69.540.000,00	58.571.561,00	84,23
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.550.000,00	1.866.000,00	73,18
c.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	67.815.425,00	64.500.425,00	95,11
d.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	56.275.007,00	56.116.382,00	99,72
e.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	27.300.000,00	26.470.000,00	96,96
f.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	52.917.995,00	52.713.105,00	99,61
g.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.999.800,00	25.997.700,00	99,99
h.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.687.500,00	6.685.000,00	99,96
i.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
j.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	2.065.000,00	2.050.000,00	99,27
k.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	173.000.000,00	173.000.000,00	100,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	128.218.550,00	126.686.506,00	98,81
a.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	40.130.000,00	39.991.450,00	99,65
b.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	15.250.000,00	14.297.106,00	93,75
c.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.370.000,00	10.200.000,00	98,36
d.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	62.468.550,00	62.197.950,00	99,57
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	37,100,000	36,841,000	99,30
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	20.700.000,00	20.700.000,00	100,00
4.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	0,00	0,00	0,00
a.	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	0,00	0,00	0,00
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.000.000,00	109.000.000,00	90,83
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120.000.000,00	109.000.000,00	90,83
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.053.623,00	24.053.623,00	100,00
a.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	24.053.623,00	24.053.623,00	100,00
7.	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	696.444.000,00	663.708.888,00	95,30
a.	Pelaksanaan Musrenbang Desa	240.469.800,00	234.442.500,00	97,49
b.	Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	216.399.200,00	208.336.900,00	96,27
c.	Pelatihan Manajemen Keuangan Desa	139.575.000,00	121.597.013,00	87,12
d.	Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	100.000.000,00	99.332.475,00	99,33
8.	Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal	328.937.750,00	322.006.741,00	97,89

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a.	Permodalan Bagi Lkm Dan Umkm Di Perdesaan	70.400.000,00	67.617.900,00	96,05
b.	Kemitraan Usaha Swasta Dan Umkm Di Perdesaan	44.599.577,00	44.499.577,00	99,78
c.	Tata Kelola Manajemen Bumdes Dan Bumdesa Bersama	111.095.100,00	108.096.264,00	97,30
d.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pasar Desa	48.905.000,00	47.925.000,00	98,00
e.	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Bumdesa Dan Pasar Desa	27.040.000,00	26.970.000,00	99,74
f.	Peningkatan Kapasitas Pendampingan Desa	26.898.073,00	26.898.000,00	100,00
9.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.454.415.350,00	1.389.653.035,00	95,55
a.	Pembinaan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga	766.801.250,00	754.444.575,00	98,39
b.	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	216.025.900,00	165.866.400,00	76,78
c.	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan	150.507.900,00	150.504.530,00	100,00
d.	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (Pmt-As)	73.983.300,00	73.983.300,00	100,00
e.	Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	67.169.900,00	65.869.900,00	98,06
f.	Pelatihan Posyandu	33.581.000,00	33.381.000,00	99,40
g.	Penyusunan Profil Desa	37.384.500,00	37.154.500,00	99,38
h.	Peningkatan Kapasitas Profesional Program Pembangunan Dan Pmd (P3md)	84.800.000,00	84.295.000,00	99,40
i.	Pendataan Indeks Desa Membangun	24.161.600,00	24.153.830,00	99,97
10.	Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	404.850.000,00	402.560.600,00	99,43
a.	Pemetaan Kawasan Berdasarkan Potensi Sumber Daya Alam	65.375.000,00	65.057.500,00	99,51
b.	Gelar Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Teknologi	81.150.200,00	81.104.400,00	99,94
c.	Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam di Perdesaan	197.784.800,00	197.628.400,00	99,92
d.	Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	60.540.000,00	58.770.300,00	97,08
TOTAL		3.686.770.000,00	3.551.338.666,00	96,33

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. **8.417.203.000,-** dengan realisasi penyerapan per Desember 2019 sebesar Rp. **8.203.118.438,-** atau capaian kinerja keuangan **97,46** persen.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah melaksanakan 9 (sembilan) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan.

Analisa dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja 2019

Adapun kondisi yang diharapkan pada tahun 2019 dari Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut ;

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kab. Ktw. Barat

No	Sasaran	Indikator	Base Line Data	Target Capaian	
				2018	2019
1	Terwujudnya pemerintahan desa yang profesional	Jumlah Desa Yang Telah Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Tepat Waktu	n/a	81 Desa	81 Desa
2	Terbentuknya Lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat yang sehat	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang sudah terbina	n/a	8 %	12%
3	Keberdayaan Masyarakat Desa dan Kelembagaan Desa	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif	n/a	100 %	100%
4	Menumbuhkembangkan penguatan sistem inovasi di masyarakat	Prosentase Desa terakses Teknologi Tepat Guna	n/a	8,64 %	50%
5	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	n/a	90%	90%

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran-sasaran dengan indikator-indikator diatas sampai dengan bulan Desember 2019 disajikan pada tabel berikut ;

Tabel 1.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kab. Ktw. Barat

No	Indikator	Base Line Data	Target Capaian		Realisasi
			2018	2019	
1	Jumlah Desa Yang Telah Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Yang Benar dan Tepat Waktu	n/a	100%	100%	80%
2	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang sudah terbina	n/a	8 %	12	100%
3	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif	n/a	100%	100%	100%
4	Prosentase Desa terakses Teknologi Tepat Guna	n/a	8,64%	50%	100%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	n/a	90%	90%	100%

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Kemiskinan masih merupakan salah satu permasalahan yang akan terus mengiringi langkah pembangunan suatu daerah. Bahkan, isu kemiskinan akan

selalu menjadi hal utama dilaksanakannya pembangunan di segala bidang, tidak terkecuali di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Walaupun pembangunan di berbagai bidang sudah dilaksanakan, namun berdasarkan data BPS 2014, masih ada 5,24 % masyarakat miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Diperlukan usaha yang lebih untuk mencapai target penurunan kemiskinan tersebut. Salah satu upaya yang populer dalam penanggulangan kemiskinan dewasa ini adalah melalui pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan adalah Bottom-Up yang berlawanan dengan pendekatan konvensional yang Top-Down. Dalam artian, ada upaya untuk memberikan wewenang dan kekuasaan lebih kepada masyarakat untuk menentukan sendiri arah pembangunan yang diinginkan dan dibutuhkannya.

Isu-isu dan permasalahan pemberdayaan masyarakat yang akan dihadapi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017-2022 tidak terlepas dari permasalahan tersebut diatas, yaitu pemecahan masalah kemiskinan secara komprehensif. Dalam konteks pemberdayaan, maka pemecahan masalah kemiskinan diatas adalah dalam hal memfasilitasi pengembangan masyarakat dan desa, peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat pada bab sebelumnya, maka dapat digambarkan permasalahan-permasalahan pelayanan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kotawaringin Barat :

No	Permasalahan	Acuan Permasalahan
Negatif		
1	Keterbatasan Anggaran yang dialokasikan setiap tahun	Renstra Dinas PMD sebelumnya
2	Sarana Prasarana Kantor masih belum mencukupi	Renstra Dinas PMD sebelumnya
3	Ketersediaan Data Base masih sangat terbatas	Renstra Dinas PMD sebelumnya
4	Teknologi Informasi belum terintegrasi lintas stakeholder	Renstra Dinas PMD sebelumnya

5	Pengetahuan dan keterampilan aparat desa dalam mengelola Pemerintah Desa masih relatif rendah	Keadaan riil
6	Kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam masih rendah	Keadaan riil
7	Kelembagaan ekonomi desa masih belum berjalan maksimal	Renstra Dinas PMD sebelumnya
8	Pembangunan desa belum terintegrasi berbasis kawasan	Renstra Dinas PMD sebelumnya
Positif		
1	Regulasi / Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Barat, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat	Perbup No. 55 Tahun 2016
2	Sumber Daya Manusia (SDM) cukup memadai	Keadaan riil
3	P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebagai Mitra kerja dinas	Renstra Dinas PMD sebelumnya
4	Renstra SKPD Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat	Renstra Dinas PMD sebelumnya
5	Alokasi dana transfer dari pusat dan daerah ke desa	UU Desa
6	Regulasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa relatif lengkap	UU Desa
7	Potensi sumber daya alam di desa cukup banyak	Profil Desa
8	Akses transportasi ke semua desa relatif mudah dijangkau	Profil Desa

Memperhatikan kembali permasalahan pada tabel diatas, maka dengan Analisa SWOT dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Akselerasi Percepatan Peningkatan Desa Mandiri melalui Penegakan Aturan dan Regulasi tentang Desa
- b. Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
- c. Revitalisasi Fungsi Kelembagaan dan Peran Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Desa Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Ekonomi Masyarakat Perdesaan

- d. Integrasi Pembangunan Desa melalui Eksplorasi dan Inovasi Pengembangan Teknologi sebagai Upaya Percepatan Pembangunan dalam Ruanglingkup Pembangunan Kawasan Perdesaan
- e. Percepatan Pembangunan Desa Melalui Sinergitas Stakeholders.
- f. Revitalisasi Kelembagaan Desa (Formal dan Informal) sebagai Wujud Menjaga Kearifan Lokal
- g. Integrasi Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dengan RPJMD sebagai Upaya Mengawal Pembangunan Desa

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel. 2.5 Tabel Analisa Kebutuhan

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegi atan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%	620.100.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%	611.311.750
Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas PMD	Jumlah paket/ surat yang terkirim	-	-	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas PMD	Jumlah paket/ surat yang terkirim	-	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PMD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	99.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PMD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	77.400.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas PMD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	7 unit/thn	3.000.000,	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas PMD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	5 unit/thn	2.550.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas PMD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	12 Bulan	93.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas PMD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	12 bulan	102.168.850

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas PMD	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan	38.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas PMD	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan	52.600.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas PMD	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	37 Unit	22.000.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas PMD	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	37 unit/thn	27.300.000
Penyediaan alat tulis kantor	Dinas PMD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	36 Jenis	63.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas PMD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	36 Jenis	52.917.995
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PMD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang	52.500 Lembar	24.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PMD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang	52.000 Lembar	24.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas PMD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	40 Buah	2.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas PMD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	45 Buah	3.887.500
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas PMD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	50.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas PMD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	25.000.000

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas PMD	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Buah	2.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas PMD	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	-	-
Penyediaan makanan dan minuman	Dinas PMD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	90 Orang	1.600.000	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas PMD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	84 orang	13.315.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas PMD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 kali	220.000.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas PMD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 Kali	230.172.405
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dinas PMD	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	736.000.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dinas PMD	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	136.420.000
Pembangunan gedung kantor	Dinas PMD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	400.000.000	Pembangunan gedung kantor	Dinas PMD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	70.000.000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas PMD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	4 Unit	100.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas PMD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas PMD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 Unit	50.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas PMD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 Unit	4.500.000

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas PMD	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 Jenis	50.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas PMD	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-	-
Pengadaan meubelair	Dinas PMD	Jumlah mebeleur yang diadakan	10 Unit	10.000.000	Pengadaan meubelair	Dinas PMD	Jumlah mebeleur yang diadakan	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas PMD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas PMD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	40.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas PMD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	12 Unit/tahun	50.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas PMD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	5 Unit/tahun	11.550.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas PMD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	20 Unit	15.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas PMD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas PMD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	22 Unit	11.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas PMD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	17 Unit	10.370.000
Program peningkatan disiplin aparatur	Dinas PMD	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	90%	42.900.000	Program peningkatan disiplin aparatur	Dinas PMD	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	90%	23.400.000

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

Pengadaan mesin/kartu absensi	Dinas PMD	Jumlah mesin absensi yg diadakan	-	-	Pengadaan mesin/kartu absensi	Dinas PMD	Jumlah mesin absensi yg diadakan	-	-
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas PMD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	40 Stell	21.450.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas PMD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	40 Stell	23.400.000
Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Dinas PMD	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	40 Stell	21.450.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Dinas PMD	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	-	-
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Dinas PMD	Persentase Pemenuhan Layanan Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	2 Orang	20.000.000	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Dinas PMD	Persentase Pemenuhan Layanan Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	-	-
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Dinas PMD	Jumlah Pegawai Pensiun yang dpulangkan	2 Orang	20.000.000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Dinas PMD	Jumlah Pegawai Pensiun yang dpulangkan	-	-
Program peningkatan kapasitas	Dinas PMD	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan	90%	130.000.000	Program peningkatan kapasitas	Dinas PMD	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan	90%	120.000.000

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

sumber daya aparatur		Kapasitas Sumber Daya Aparatur			sumber daya aparatur		Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas PMD	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25 orang	130.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas PMD	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25 orang	120.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas PMD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	40.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas PMD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	25.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas PMD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 Dokumen	2.500.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas PMD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	-	-

Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020

Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dinas PMD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dokumen	2.500.000	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dinas PMD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	-	-
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dinas PMD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	35.000.000	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dinas PMD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	25.000.000
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6 Kecamatan	Jumlah desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100%	1.495.000.000	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6 Kecamatan	Jumlah desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100%	380.021.375
Pelaksanaan musrenbangdesa	6 Kecamatan	Jumlah Desa yg melaksanakan musrenbang tepat waktu	81 Desa	135.000.000	Pelaksanaan musrenbangdesa	6 Kecamatan	Jumlah Desa yg melaksanakan musrenbang tepat waktu	81 Desa	170.469.800
Pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan Desa	6 Kecamatan	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapat pelatihan dan ketrampilan	100 Orang	415.000.000	Pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan Desa	6 Kecamatan	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapat pelatihan dan ketrampilan	-	-

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

Pelatihan manajemen keuangan Desa	6 Kecamatan	Jumlah pelatihan diadakan	1 Kali	420.000.000	Pelatihan manajemen keuangan Desa	6 Kecamatan	Jumlah pelatihan diadakan	1 Kali	74.632.200
Monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	6 Kecamatan	Jumlah laporan monev ADD & DD	81 Dokumen	125.000.000	Monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	6 Kecamatan	Jumlah laporan monev ADD & DD	81 Dokumen	134.979.375
Pengembangan Desa Berbasis IT	6 Kecamatan	Jumlah Desa Berbasis IT	-	-	Pengembangan Desa Berbasis IT	6 Kecamatan	Jumlah Desa Berbasis IT	-	-
Program Pemberdayaan n Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal	6 Kecamatan	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes, LKM dan Pasar Desa) yang berkembang	12%	874.000.000	Program Pemberdayaan n Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal	6 Kecamatan	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes, LKM dan Pasar Desa) yang berkembang	12%	277.208.170
Permodalan bagi LKM dan UMKM di Perdesaan	6 Kecamatan	Jumlah Pengelola LKM yang mendapat pelatihan	42 Orang	210.000.000	Permodalan bagi LKM dan UMKM di Perdesaan	6 Kecamatan	Jumlah Pengelola LKM yang mendapat pelatihan	50 Orang	62.750.000

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

Kemitraan usaha swasta dan UMKM di Perdesaan	1 Desa	Jumlah kegiatan FGD	1 Kali	110.000.000	Kemitraan usaha swasta dan UMKM di Perdesaan	1 Desa	Jumlah kegiatan FGD	1 Kali	22.055.470
Tata kelola manajemen BUMDesa dan BUMDesa bersama	6 Kecamatan	Jumlah pengelola BUMDes dan BUMDes Bersama yang mendapat pelatihan	90 Orang	136.000.000	Tata kelola manajemen BUMDesa dan BUMDesa bersama	6 Kecamatan	Jumlah pengelola BUMDes dan BUMDes Bersama yang mendapat pelatihan	100 Orang	108.203.400
Peningkatan kapasitas pengelolaan pasar desa	6 Kecamatan	Jumlah pengelola Pasar Desa yang mendapat pelatihan	30 Orang	75.000.000	Peningkatan kapasitas pengelolaan pasar desa	6 Kecamatan	Jumlah pengelola Pasar Desa yang mendapat pelatihan	50 Orang	58.567.800
Fasilitasi Kerjasama Ekonomi Kawasan Perdesaan	6 Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Ekonomi Kawasan Perdesaan	4 Kegiatan	75.000.000	Fasilitasi Kerjasama Ekonomi Kawasan Perdesaan	6 Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Ekonomi Kawasan Perdesaan	-	-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bumdesa dan Pasar Desa	6 Kecamatan	Tersedianya data penyertaan modal desa pada BUMDes dan BUMDes Bersama	20 Laporan	68.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6 Kecamatan	Tersedianya data penyertaan modal desa pada BUMDes dan BUMDes Bersama	20 Laporan	27.631.500
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	6 Kecamatan	Prosentase Lembaga Desa Aktif (PKK dan Posyandu)	100%	1.775.424.242	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	6 Kecamatan	Prosentase Lembaga Desa Aktif (PKK dan Posyandu)	100%	1.523.844.315

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

Pembinaan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	6 Kecamatan	Jumlah PKK Aktif	100%	639.633.000	Pembinaan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	6 Kecamatan	Jumlah PKK Aktif	100%	1.000.000.000
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	6 Kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti lomba BBGRM	6 Desa	255.500.000	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	6 Kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti lomba BBGRM	6 Desa	32.506.715
Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan	6 Kecamatan	Jumlah Desa/Kel yang dilakukan penilaian	9 Desa/Kel	265.291.242	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan	6 Kecamatan	Jumlah Desa/Kel yang dilakukan penilaian	9 Desa/Kel	149.300.000
Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)	6 Kecamatan	Jumlah Siswa yang di berikan PMT-AS	290 Siswa/i	75.000.000	Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)	6 Kecamatan	Jumlah Siswa yang di berikan PMT-AS	-	-
Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	6 Kecamatan	Jumlah Perempuan di Perdesaan sasaran yang terlatih	90 Orang	145.000.000	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	6 Kecamatan	Jumlah Perempuan di Perdesaan sasaran yang terlatih	-	-

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

Pelatihan Posyandu	6 Kecamatan	Jumlah Kader Posyandu yang mendapat pelatihan	30 Orang	40.000.000	Pelatihan Posyandu	6 Kecamatan	Jumlah Kader Posyandu yang mendapat pelatihan	30 Orang	39.386450
Penyusunan profil desa	6 Kecamatan	Prosentase Desa/Kel yang telah menyusun Profil Desa/Kel	100%	50.000.000	Penyusunan profil desa	6 Kecamatan	Prosentase Desa/Kel yang telah menyusun Profil Desa/Kel	100%	45.122.000
Peningkatan Kapasitas Profesional Program Pembangunan dan PMD (P3MD)	6 Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi P3MD yang terlaksana	12 Kali	65.000.000	Peningkatan Kapasitas Profesional Program Pembangunan dan PMD (P3MD)	6 Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi P3MD yang terlaksana	12 Kali	78.961.350
Pembentukan Unit Kerja Badan Kerjasama Desa dan BKAD	6 Kecamatan	Jumlah Unit Kerja Badan Kerjasama Desa dan BKAD yang Terbentuk	60 Unit	55.000.000	Pembentukan Unit Kerja Badan Kerjasama Desa dan BKAD	6 Kecamatan	Jumlah Unit Kerja Badan Kerjasama Desa dan BKAD yang Terbentuk	-	-
Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan	6 Kecamatan	Jumlah Peserta Pelatihan LKM yang terbina	60 Orang	85.000.000	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan	6 Kecamatan	Jumlah Peserta Pelatihan LKM yang terbina	-	-
Pendataan Indeks Desa Membangun	6 Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan pendataan	81 Desa	100.000.000	Pendataan Indeks Desa Membangun	6 Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan pendataan	81 Desa	127.000.000

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	6 Kecamatan	Prosentase Desa yang telah mengembangkan sistem inovasi	50%	530.000.000	Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	6 Kecamatan	Prosentase Desa yang telah mengembangkan sistem inovasi	50%	225.323.000
Pemetaan kawasan berdasarkan potensi sumber daya alam	6 Kecamatan	Jumlah desa yang telah memetakan potensi SDA	27%	65.000.000	Pemetaan kawasan berdasarkan potensi sumber daya alam	6 Kecamatan	Jumlah desa yang telah memetakan potensi SDA	27%	36.633.250
Gelar teknologi tepat guna dan inovasi teknologi	6 Kecamatan	Jumlah Kegiatan Gelar TTG yang diikuti	2 Kali	300.000.000	Gelar teknologi tepat guna dan inovasi teknologi	6 Kecamatan	Jumlah Kegiatan Gelar TTG yang diikuti	2 Kali	81.700.000
Pengembangan potensi sumber daya alam di Perdesaan	6 Kecamatan	Jumlah Pengelola Pamsimas yang dilatih	50 Orang	30.000.000	Pengembangan potensi sumber daya alam di Perdesaan	6 Kecamatan	Jumlah Pengelola Pamsimas yang dilatih	50 Orang	30.056.500
Pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna	6 Kecamatan	Prosentase pengurus Posyantek yang terlatih	60%	135.000.000	Pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna	6 Kecamatan	Prosentase pengurus Posyantek yang terlatih	60%	76.944.640

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

JUMLAH				6.113.424. 242	JUMLAH				3.323.000. 000
--------	--	--	--	-------------------	--------	--	--	--	-------------------

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat akan selalu memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SOPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SOPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SOPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Memperhatikan Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi 2015-2019, maka beberapa hal yang dapat dijadikan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat lima tahun kedepan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
2. Peningkatan Kelembagaan Desa
3. Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
4. Peningkatan infrastruktur koneksitas dan transportasi, telekomunikasi, informasi dan energi desa.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran atau objectives organisasi merupakan tingkat capaian yang diharapkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

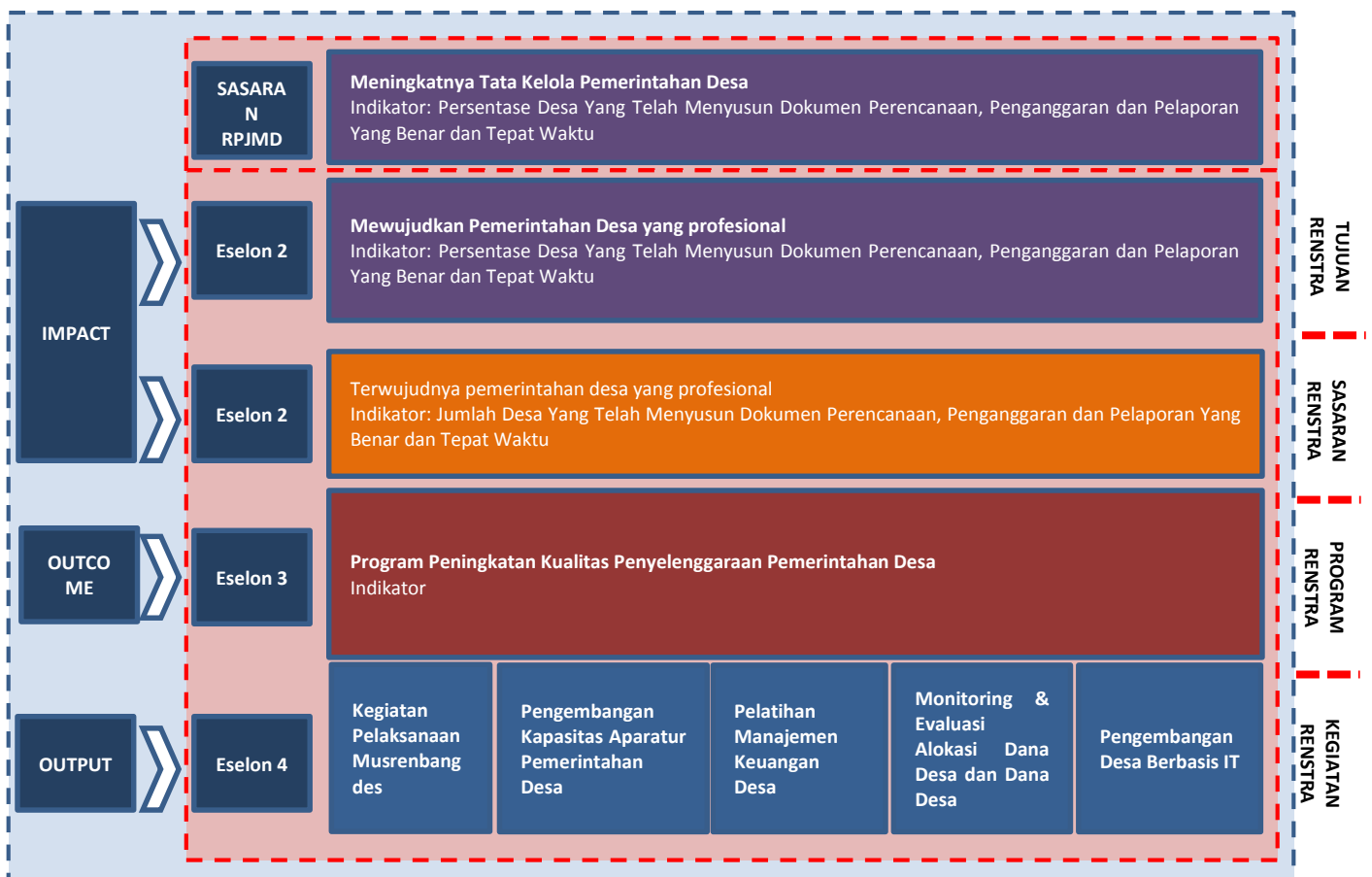
Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

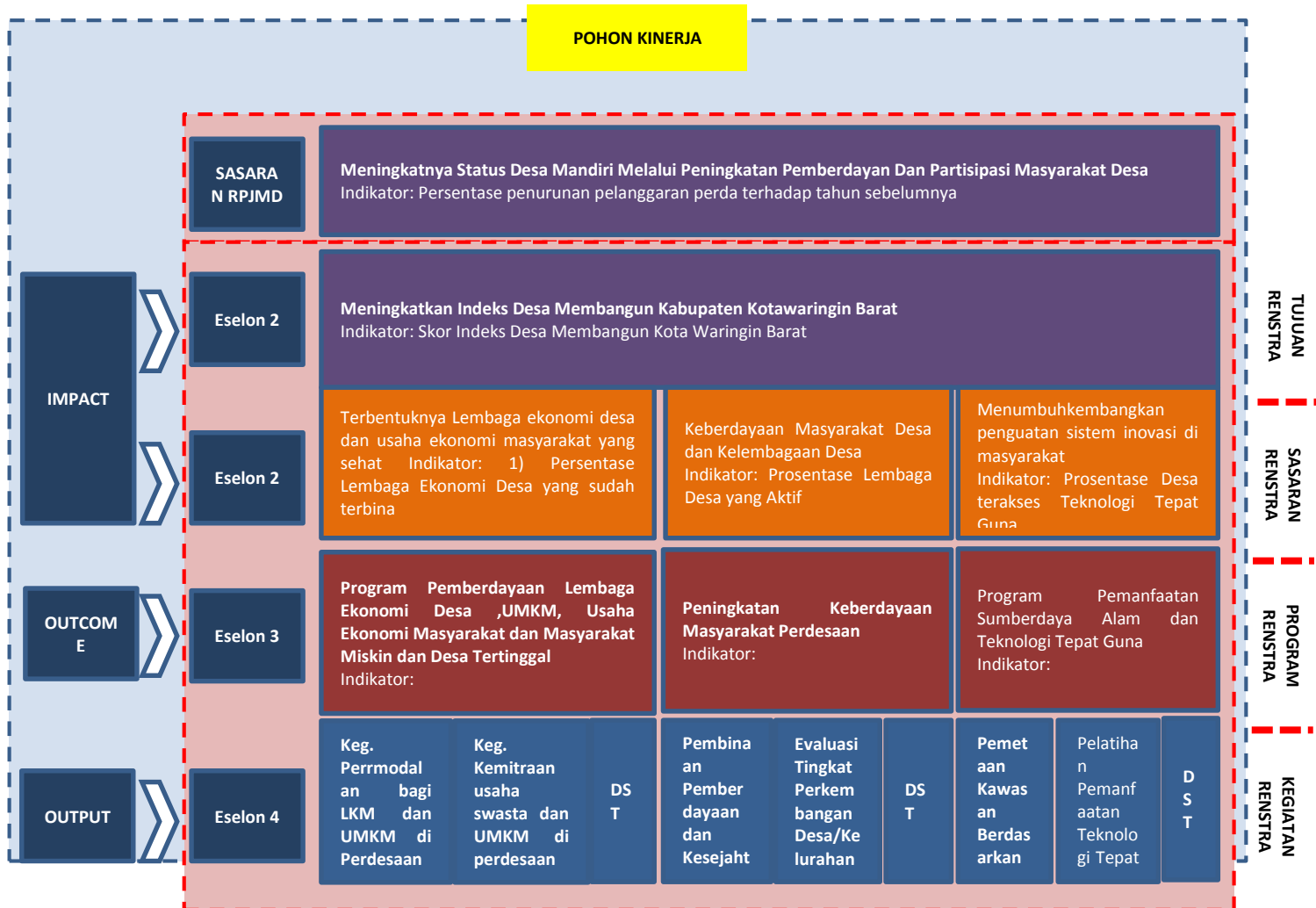
**Tabel Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah
beserta indikator kerjanya**

Sasaran RPJMD	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke N				
			2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional	Jumlah Desa Yang Telah Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Yang Benar dan Tepat Waktu	0,7	0,8	100	100	100
Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa	Meningkatkan Indeks Desa Membangun Kabupaten Kotawaringin Barat	Persentase Desa Mandiri	5%	5%	4%	4%	4%

Untuk menunjukkan kesinambungan antara Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 maka dapat dilihat pada Pohon Kinerja sebagai berikut ;

POHON KINERJA





III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan membantu Bupati Kotawaringin Barat dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas PMD seperti disebutkan diatas, maka Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun Program-program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
8. Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal
9. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
10. Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Adapun Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibuat dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan sekaligus Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

RUMUSAN RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA LANGSUNG				2.205.159.000	APBD			14.768.524.450
00001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	90%	593.656.050	APBD		12 Bulan	769.628.450
207010101	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/ surat yang terkirim	Dinas PMD	-	-	APBD		100 Paket	2.000.000
207010102	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PMD	12 bulan	59.940.000	APBD		12 bulan	75.000.000
207010106	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Dinas PMD	5 unit/thn	1.860.500	APBD		5 unit/thn	5.000.000
207010107	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Dinas PMD	12 bulan	134.514.000	APBD		12 bulan	105.000.000
207010108	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	Dinas PMD	12 Bulan	52.300.800	APBD		12 bulan	55.000.000
207010109	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	Dinas PMD	33 unit/thn	23.150.000	APBD		45 Unit	33.000.000

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

207010110	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Dinas PMD	32 Jenis	47.144.750	APBD		35 Jenis	52.941.150
207010111	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas PMD	31.428	10.999.800	APBD		57.666 Lembar	25.999.800
207010112	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	Dinas PMD	2 Jenis	3.944.250	APBD		70 Jenis	6.687.500
207010113	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas PMD	2 Unit	22.604.600	APBD		5 Unit	75.000.000
207010114	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Dinas PMD	-	-	APBD		1 Unit	1.500.000
207010115	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Buku dan Peraturan yang diadakan	Dinas PMD	-	-	APBD		5 Buku	2.500.000
207010117	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Dinas PMD	387 orang	23.105.000	APBD		350 orang	30.000.000
207010118	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas PMD	40 Kali	214.092.350	APBD		50 Kali	300.000.000
00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas PMD	90%	79.082.100	APBD		90%	10.197.896.000
207010203	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Dinas PMD	1 Unit	-	APBD		1 Unit	9.788.526.000

Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020

207010205	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	-	-	APBD		4 unit	100.000.000
207010207	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Dinas PMD	1 unit	-	APBD		-	-
207010209	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-	-	-	APBD		2 Unit	24.000.000
207010210	Pengadaan meubelair	Jumlah mebeleur yang diadakan	-	2 Unit	15.000.000	APBD		74 Buah	206.000.000
207010213	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinas PMD	1 unit	39.661.000	APBD		1 unit	40.000.000
207010215	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Dinas PMD	2 Unit/tahun	14.051.100	APBD		5 Unit/tahun	29.000.000
207010217	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	-	APBD		-	-
207010219	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Dinas PMD	17 Unit	10.370.000	APBD		17 Unit	10.370.000
00003	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	Dinas PMD	100%	-	APBD		100%	54.000.000
207010301	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi yg diadakan	-	-	-	APBD		1 Unit	10.000.000

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

207010302	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Dinas PMD	40 Stel	-	APBD		40 stel	22.000.000
207010305	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	-	-	-	APBD		40 Stel	22.000.000
00004	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Pemenuhan Layanan Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	-	-	-	APBD		-	-
207010401	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	-	-	-	APBD		-	-
00005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas PMD	90%	11.381.000	APBD		90%	240.000.000
207010503	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas PMD	1 orang	11.381.000	APBD		28 orang	240.000.000
00006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dinas PMD	90%	20.255.000	APBD		90%	157.000.000
207010601	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	-	-	-	APBD		2 Laporan	130.000.000
207010602	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	-	-	-	APBD		2 Dokumen	2.000.000
207010604	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dinas PMD	1 Dokumen	20.255.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

20715	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100%	6 Kecamatan	178.648.300	APBD		100%	780.000.000
207011501	Pelaksanaan Musrenbangdes	Jumlah Desa yg melaksanakan musrenbang tepat waktu	81 Desa	81 Desa	78.479.000	APBD		81 Desa	180.000.000
207011502	Pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapat pelatihan dan ketrampilan	-	-	-	APBD		162 Orang	150.000.000
207011503	Pelatihan manajemen keuangan Desa	Jumlah pelatihan diadakan	Arut Selatan	1 Kali	24.990.000	APBD		1 Kali	125.000.000
207011504	Monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	Jumlah laporan monev ADD & DD	81 Desa	81 Dokumen	75.179.300	APBD		81 Dokumen	125.000.000
207011505	Pengembangan Desa Berbasis IT	Jumlah Desa Berbasis IT	-	-	-	APBD		3 Desa	200.000.000
20716	Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa ,UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes, LKM dan Pasar Desa) yang berkembang	6 Kecamatan	12%	133.886.350	APBD		90%	335.000.000
207011601	Permodalan bagi LKM dan UMKM di Perdesaan	Jumlah Pengelola LKM yang mendapat pelatihan	6 Kecamatan	42 Orang	38.635.000	APBD		50 Orang	75.000.000
207011602	Kemitraan usaha swasta dan UMKM di Perdesaan	Jumlah kegiatan FGD	1 Desa	1 Kali	19.067.850	APBD		2 Kali	40.000.000
207011603	Tata kelola manajemen BUMDesa dan BUMDesa bersama	Jumlah pengelola BUMDes dan BUMDes Bersama yang mendapat pelatihan	6 Kecamatan	100 Orang	-	APBD		90 Orang	125.000.000
207011604	Peningkatan kapasitas pengelolaan pasar desa	Jumlah pengelola Pasar Desa yang mendapat pelatihan	6 Kecamatan	30 Orang	27.158.500	APBD		30 Orang	30.000.000

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

207011606	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya data penyertaan modal desa pada BUMDes dan BUMDes Bersama	6 Kecamatan	20 Laporan	29.025.000	APBD		20 Laporan	100.000.000
20717	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase Lembaga Desa Aktif (PKK dan Posyandu)	6 Kecamatan	100%	943.711.700	APBD		100%	2.267.442.291
207011701	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK Aktif	6 Kecamatan	100%	514.975.100	APBD		100%	1.000.000.000
207011702	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Jumlah desa yang mengikuti lomba BBGRM	6 Kecamatan	6 Desa	246.690.000	APBD		6 Desa	50.000.000
207011703	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kel yang dilakukan penilaian	6 Kecamatan	9 Desa/Kel	128.486.200	APBD		9 Desa/Kel	200.000.000
207011704	Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)	Jumlah Siswa yang di berikan PMT-AS	Desa Tertinggal	290 Siswa/i	-	APBD		-	-
207011705	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah Perempuan di Perdesaan sasaran yang terlatih	Desa Sasaran	60 Orang	-	APBD		-	-
207011706	Pelatihan Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang mendapat pelatihan	6 Kecamatan	90 Orang	47.665.500	APBD		90 Orang	90.000.000
207011707	Penyusunan profil desa	Prosentase Desa/Kel yang telah menyusun Profil Desa/Kel	6 Kecamatan	100%	-	APBD		100%	50.000.000
207011708	Peningkatan Kapasitas Profesional Program Pembangunan dan PMD (P3M)	Jumlah Rapat Koordinasi P3MD yang terlaksana	6 Kecamatan	6 Kali	54.435.000	APBD		12 Kali	80.000.000
207011709	Pembentukan Unit Kerja Badan Kerjasama Desa dan BKAD	Jumlah Unit Kerja Badan Kerjasama Desa dan BKAD yang Terbentuk	-	-	-	APBD		5 Unit/Badan	75.000.000
207011710	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan	Jumlah Peserta Pelatihan LKM yang terbina	-	-	-	APBD		90 Orang	100.000.000
207011711	Pendataan Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa yang dilakukan pendataan	6 Kecamatan	81 Desa	101.459.900	APBD		81 Desa	125.000.000

*Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perubahan 2020*

20718	Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Prosentase Desa yang telah mengembangkan sistem inovasi	6 Kecamatan	90%	225.323.000	APBD		75%	420.000.000
207011801	Pemetaan kawasan berdasarkan potensi sumber daya alam	Jumlah desa yang telah memetakan potensi SDA	6 Kecamatan	27%	38.865.500	APBD		41%	75.000.000
207011802	Gelar teknologi tepat guna dan inovasi teknologi	Jumlah Kegiatan Gelar TTG yang diikuti	1 Kali	2 Kali	-	APBD		2 Kali	150.000.000
207011803	Pengembangan potensi sumber daya alam di Perdesaan	Jumlah Pengelola Pamsimas yang dilatih	6 Kecamatan	50 Orang	1.600.000	APBD		60 Orang	40.000.000
207011804	Pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna	Prosentase pengurus Posyantek yang terlatih	6 Kecamatan	60%	74.073.000	APBD		72%	155.000.000
	JUMLAH				2.205.159.000				14.768.524.450

BAB IV P E N U T U P

Output Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **Program Tahunan** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat

Prinsip pelaksanaan arah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta pencapaian tujuan dan sasaran didasarkan pada kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Partisipatif;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengutamakan partisipasi masyarakat dan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat.

2. Demokratis;

Berorientasi pada musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai – nilai demokrasi dan kearifan lokal.

3. Kapabilitas;

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan berbagai potensi yang dimiliki dan kemampuan pemerintah desa dalam program pemberdayaan.

4. Responsible;

Menekankan tanggung jawab baik aparat pemberdayaan maupun masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan program pemberdayaan.

5. Akuntabilitas dan transparan;

Pelaksanaan program pemberdayaan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Keberlanjutan;

Program pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan sumber dayamasyarakat secara optimal yang ramah lingkungan sertaberkesinambungan dalam suatu tahapan – tahapan tertentu.

7. Integratif

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan serta proses interaksi antarelelemen pembangunan termasuk masyarakat dalam pelaksanaan programpemberdayaan secara terpadu dan terintegrasi dalam suatu keutuhan masyarakat dan pemerintah desa.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat pada TA 2020. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, RENJA Perubahan 2020 juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Pangkalan Bun, Agustus 2020
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Dra. HARDANIYANTI
NIP 19620515 198903 2 007